



URGENSI PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Ananda Pertiwi^{1*}

¹ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pamulang, Indonesia

Corresponding Author: anandatiwio@gmail.com*

Abstract: Pancasila, as Indonesia's national ideology, plays a strategic role in maintaining national identity amidst increasingly complex globalization. Globalization brings both positive and negative impacts, such as advances in science and technology on the one hand, and the emergence of values such as individualism, materialism, and hedonism on the other, which have the potential to undermine the nation's core values. This study aims to analyze the dynamics of Pancasila as a national ideology in facing the challenges of globalization and to examine efforts to actualize its values in national and state life. The method used is a literature review by analyzing various scientific journals and relevant literature. The results of the study indicate that Pancasila is dynamic and open, so it is able to adapt to developments over time without losing its fundamental values. Pancasila also functions as a filter for foreign ideologies and as a guideline in shaping public policy and national character. Therefore, strengthening the implementation of Pancasila values through education, government policies, and community participation is crucial to ensure its relevance in the era of globalization.

Keywords: Pancasila, National Ideology, Globalization, National Identity, Pancasila Values

Abstrak: Pancasila, sebagai ideologi nasional Indonesia, memainkan peran strategis dalam menjaga identitas nasional di tengah globalisasi yang semakin kompleks. Globalisasi membawa dampak positif dan negatif, seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di satu sisi, dan munculnya nilai-nilai seperti individualisme, materialisme, dan hedonisme di sisi lain, yang berpotensi merusak nilai-nilai inti bangsa. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dinamika Pancasila sebagai ideologi nasional dalam menghadapi tantangan globalisasi dan untuk meneliti upaya mengaktualisasikan nilai-nilainya dalam kehidupan nasional dan negara. Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka dengan menganalisis berbagai jurnal ilmiah dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila bersifat dinamis dan terbuka, sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan dari waktu ke waktu tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya. Pancasila juga berfungsi sebagai penyaring ideologi asing dan sebagai pedoman dalam membentuk kebijakan publik dan karakter nasional. Oleh karena itu, penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, kebijakan pemerintah, dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan relevansinya di era globalisasi.

Kata Kunci: Pancasila, Ideologi Nasional, Globalisasi, Identitas Bangsa, Nilai-Nilai Pancasila

Article info: Accepted

Recommended citation: APA Style v.7

How to Cite:

Pertiwi, A. (2026). Urgensi Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Pancasila and Civics Education Journal*, 5(2). 182-189

<https://doi.org/10.30596/pcej.v5i2.30479>



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

INTRODUCTION

Perubahan sosial yang dipicu oleh globalisasi, revolusi industri 4.0, dan perkembangan teknologi digital telah menghadirkan tantangan baru dalam pembentukan karakter generasi muda. Kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan akses pengetahuan tanpa batas ternyata tidak selalu diikuti oleh penguatan nilai moral dan etika. Berbagai fenomena seperti meningkatnya intoleransi, cyberbullying, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, perilaku individualistik, rendahnya kepedulian sosial, hingga menurunnya partisipasi kewargaan menjadi indikator bahwa pembangunan karakter bangsa menghadapi tantangan yang semakin kompleks (Banks, 2017; Bennett, 2008; Kahne & Bowyer, 2017; OECD, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak dapat hanya berorientasi pada pengembangan kemampuan akademik, tetapi juga harus mampu membentuk karakter peserta didik agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berintegritas.

Pendidikan karakter pada hakikatnya merupakan proses sistematis untuk menanamkan nilai-nilai moral yang memungkinkan individu memahami, menghayati, dan mengimplementasikan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari (Lickona, 1991). Karakter tidak hanya berkaitan dengan aspek pengetahuan moral (*moral knowing*), tetapi juga mencakup dimensi perasaan moral (*moral feeling*) dan tindakan moral (*moral action*) yang terintegrasi dalam perilaku individu (Lickona, 1991; Berkowitz & Bier, 2005). Oleh karena itu, pendidikan karakter dipandang sebagai fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas, tanggung jawab sosial, serta komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan (Nucci & Narvaez, 2008).

Dalam konteks Indonesia, urgensi pendidikan karakter semakin menguat seiring dengan meningkatnya berbagai persoalan sosial yang melibatkan peserta didik. Fenomena perundungan, tawuran pelajar, kekerasan di lingkungan pendidikan, rendahnya etika digital, serta menurunnya rasa hormat terhadap keberagaman menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian akademik dan pembentukan karakter (Kemendikbud, 2022). Padahal, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara tegas menempatkan pembentukan karakter sebagai tujuan utama pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, demokratis, dan bertanggung jawab.

Salah satu mata pelajaran yang memiliki posisi strategis dalam penguatan karakter peserta didik adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Secara konseptual, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang bertujuan membentuk warga negara yang baik (*good citizen*) melalui pengembangan pengetahuan kewargaan (*civic knowledge*), keterampilan kewargaan (*civic skills*), dan karakter kewargaan (*civic dispositions*) (Branson, 1998; Winataputra, 2015). PKn tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan mengenai negara, hukum, dan politik, tetapi juga sebagai wahana internalisasi nilai-nilai demokrasi, keadilan, tanggung jawab, toleransi, partisipasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Cogan & Derricott, 1998; Print, 2007).

Secara teoritis, hubungan antara pendidikan karakter dan Pendidikan Kewarganegaraan dapat dijelaskan melalui konsep *civic virtue* yang dikemukakan oleh Aristotle dan dikembangkan dalam teori kewargaan modern. *Civic virtue* menekankan pentingnya pembentukan karakter warga negara yang memiliki kesadaran moral, kepedulian terhadap kepentingan publik, dan komitmen terhadap kehidupan demokratis (Galston, 2001). Dalam perspektif ini, Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai instrumen pembentukan karakter demokratis yang

memungkinkan peserta didik memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara sekaligus mengembangkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Westheimer & Kahne, 2004).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kontribusi signifikan terhadap pembentukan karakter peserta didik. Penelitian Torney-Purta et al. (2001) menemukan bahwa pendidikan kewarganegaraan berpengaruh positif terhadap perkembangan sikap demokratis dan partisipasi politik generasi muda. Temuan serupa dikemukakan oleh Schulz et al. (2018) melalui studi ICCS yang menunjukkan bahwa pengalaman pembelajaran kewarganegaraan yang berkualitas mampu meningkatkan toleransi, kepercayaan sosial, dan partisipasi sipil siswa. Di Indonesia, penelitian Wahab dan Sapriya (2011), Winataputra (2015), serta Winarno (2014) menunjukkan bahwa PKn berperan penting dalam membangun karakter kebangsaan, kesadaran hukum, dan tanggung jawab sosial peserta didik.

Meskipun demikian, implementasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam praktik pembelajaran masih menghadapi berbagai tantangan. Pembelajaran PKn di banyak sekolah masih cenderung berorientasi pada aspek kognitif dan penguasaan materi semata, sehingga internalisasi nilai dan pembentukan karakter belum berlangsung secara optimal (Kerr, 1999; Davies et al., 2005). Akibatnya, peserta didik sering kali memahami konsep demokrasi, hak asasi manusia, dan tanggung jawab kewarganegaraan secara teoritis, tetapi belum mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif Pendidikan Kewarganegaraan dengan realitas pembelajaran di lapangan.

Tantangan tersebut semakin kompleks di era digital ketika ruang publik tidak lagi terbatas pada lingkungan fisik, tetapi juga mencakup ruang virtual yang sarat dengan arus informasi dan kontestasi ideologi. Generasi muda saat ini menghadapi paparan informasi politik, sosial, dan budaya yang sangat besar melalui media sosial. Di satu sisi, kondisi ini dapat meningkatkan partisipasi kewarganegaraan digital (*digital citizenship*), namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan polarisasi, radikalisme, disinformasi, dan degradasi etika komunikasi publik (Ribble, 2015; Choi, 2016; Kahne & Bowyer, 2017). Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan perlu direkonstruksi sebagai wahana pendidikan karakter yang mampu membentuk warga negara digital yang kritis, etis, dan bertanggung jawab.

Kajian-kajian terdahulu umumnya menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pembentukan karakter demokratis, tetapi masih sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji urgensi PKn sebagai instrumen strategis pendidikan karakter dalam menghadapi tantangan kewarganegaraan abad ke-21 yang ditandai oleh transformasi digital, krisis moral, dan perubahan pola interaksi sosial generasi muda. Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk memperkuat argumentasi mengenai relevansi Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun karakter peserta didik yang adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan identitas kebangsaan dan nilai-nilai moral.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis urgensi pendidikan karakter melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya membentuk warga negara yang berkarakter, demokratis, bertanggung jawab, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan sosial pada era digital. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan teori Pendidikan Kewarganegaraan sekaligus menjadi dasar bagi penguatan praktik pendidikan karakter di lingkungan sekolah.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis secara mendalam dinamika Pancasila sebagai ideologi nasional dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang muncul akibat arus globalisasi. Menurut Creswell dan Creswell (2018), penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan melalui interpretasi terhadap berbagai sumber informasi. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji relevansi, eksistensi, serta urgensi Pendidikan karakter dalam PKn. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan berbagai sumber literatur sebagai objek utama kajian. Zed (2018) menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian yang berasal dari berbagai sumber tertulis. Penelitian kepustakaan sangat relevan digunakan untuk mengkaji isu-isu konseptual, filosofis, dan teoritis, termasuk pembahasan mengenai urgensi Pendidikan karakter dalam PKn.

RESULT AND DISCUSSION

Pendidikan karakter merupakan isu yang semakin penting dalam sistem pendidikan modern seiring meningkatnya berbagai tantangan sosial, budaya, dan teknologi yang dihadapi generasi muda. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa krisis karakter yang ditandai oleh meningkatnya intoleransi, perilaku kekerasan, rendahnya kepedulian sosial, penyalahgunaan media digital, serta menurunnya rasa tanggung jawab kewargaan merupakan fenomena global yang memerlukan perhatian serius dari dunia pendidikan (OECD, 2021; Kahne & Bowyer, 2017). Dalam konteks tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki posisi yang sangat strategis karena secara filosofis, sosiologis, dan pedagogis dirancang untuk membentuk warga negara yang baik (*good citizen*) melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan karakter kewargaan (Branson, 1998; Cogan & Derricott, 1998).

Secara konseptual, pendidikan karakter dan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki hubungan yang sangat erat. Pendidikan karakter berorientasi pada pembentukan nilai-nilai moral yang menjadi dasar perilaku individu, sedangkan Pendidikan Kewarganegaraan berfokus pada pengembangan kapasitas warga negara agar mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis (Lickona, 1991; Galston, 2001). Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan sesungguhnya merupakan wahana strategis untuk mentransformasikan nilai-nilai karakter menjadi perilaku kewargaan yang nyata. Hubungan ini menunjukkan bahwa keberhasilan Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya diukur melalui penguasaan konsep-konsep politik, hukum, dan pemerintahan, tetapi juga melalui kemampuan peserta didik dalam mengimplementasikan nilai-nilai moral dalam kehidupan sosial.

Dalam perspektif teori karakter yang dikembangkan Lickona (1991), pendidikan karakter terdiri atas tiga komponen utama yaitu *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action*. Ketiga komponen tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan. Pada dimensi *moral knowing*, peserta didik memperoleh pemahaman mengenai nilai demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Pada dimensi *moral feeling*, peserta didik mengembangkan empati, kepedulian sosial, serta komitmen terhadap kepentingan publik. Selanjutnya, pada dimensi *moral action*, peserta didik didorong untuk menerapkan nilai-nilai tersebut melalui partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat dan negara. Dengan kata lain,

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi media yang menghubungkan pengetahuan moral dengan tindakan sosial yang konkret.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa urgensi pendidikan karakter melalui Pendidikan Kewarganegaraan semakin meningkat pada era digital. Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan ruang publik baru yang memungkinkan generasi muda berinteraksi secara bebas tanpa batas geografis. Namun, ruang digital juga menghadirkan berbagai risiko seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, polarisasi politik, radikalisme digital, dan rendahnya etika komunikasi publik (Choi, 2016; Ribble, 2015). Fenomena ini memperlihatkan bahwa kecakapan digital semata tidak cukup untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab. Generasi muda memerlukan landasan karakter yang kuat agar mampu menggunakan teknologi secara kritis, etis, dan demokratis. Dalam konteks ini, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membangun *digital citizenship*, yaitu kemampuan warga negara untuk berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam ruang digital dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan.

Temuan kajian juga menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kontribusi signifikan terhadap pembentukan *civic character*. Konsep *civic character* merujuk pada kualitas moral yang memungkinkan individu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokratis serta memiliki kepedulian terhadap kepentingan publik (Westheimer & Kahne, 2004). Karakter kewargaan tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga meliputi sikap toleran, kemampuan berpikir kritis, penghormatan terhadap keberagaman, kesediaan berdialog, serta keberanian memperjuangkan keadilan sosial. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan tidak boleh dipahami secara sempit sebagai pendidikan politik atau pendidikan hukum semata, melainkan sebagai pendidikan nilai yang bertujuan membentuk identitas kewargaan peserta didik.

Lebih jauh, kajian ini menemukan bahwa tantangan utama implementasi Pendidikan Kewarganegaraan saat ini adalah dominannya pendekatan pembelajaran yang masih berorientasi pada transfer pengetahuan. Banyak praktik pembelajaran PKn yang masih menekankan aspek hafalan konsep dibandingkan internalisasi nilai dan pengalaman kewargaan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara pemahaman peserta didik mengenai nilai-nilai demokrasi dengan praktik perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena tersebut mengindikasikan perlunya transformasi paradigma pembelajaran PKn dari pendekatan informatif menuju pendekatan transformatif yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses pembentukan karakter (Biesta, 2011; Veugelers, 2011).

Berdasarkan sintesis berbagai kajian, artikel ini mengargumentasikan bahwa pendidikan karakter melalui Pendidikan Kewarganegaraan harus dibangun melalui proses yang bersifat integratif. Proses tersebut dimulai dari penguasaan pengetahuan kewargaan (*civic knowledge*), dilanjutkan dengan refleksi kritis terhadap realitas sosial (*civic reflection*), internalisasi nilai-nilai moral (*value internalization*), keterlibatan dalam aktivitas sosial (*civic engagement*), dan berujung pada terbentuknya karakter kewargaan (*civic character*). Model ini menunjukkan bahwa karakter tidak terbentuk melalui indoktrinasi, melainkan melalui pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik menghubungkan nilai, refleksi, dan tindakan secara berkelanjutan.

Secara teoretis, temuan kajian ini memperkuat pandangan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan instrumen utama dalam pengembangan karakter demokratis warga negara. Pendidikan karakter dan Pendidikan Kewarganegaraan bukanlah dua konsep yang berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam membentuk warga negara yang cerdas,

berintegritas, dan bertanggung jawab. Secara praktis, hasil kajian ini mengimplikasikan perlunya penguatan model pembelajaran yang lebih partisipatif, dialogis, reflektif, dan kontekstual melalui strategi seperti *project citizen*, *service learning*, pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*), dan pembelajaran berbasis proyek kewargaan. Melalui pendekatan tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya menjadi sarana transfer pengetahuan, tetapi juga menjadi medium transformasi karakter yang mampu mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan demokrasi dan kehidupan sosial pada abad ke-21.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam menjawab berbagai tantangan sosial, budaya, politik, dan digital yang dihadapi generasi muda pada abad ke-21. Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan mengenai negara, hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia, tetapi juga sebagai wahana strategis untuk menginternalisasikan nilai-nilai karakter yang menjadi fondasi terbentuknya warga negara yang baik (*good citizen*). Melalui integrasi dimensi *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic dispositions*, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mampu membentuk peserta didik yang tidak hanya memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, tetapi juga memiliki sikap tanggung jawab, kejujuran, toleransi, kepedulian sosial, nasionalisme, serta komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial. Di tengah perkembangan teknologi digital yang memunculkan berbagai persoalan seperti disinformasi, ujaran kebencian, polarisasi sosial, dan degradasi etika komunikasi publik, pendidikan karakter menjadi instrumen penting dalam membangun kesadaran moral dan kewargaan yang kritis, reflektif, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter melalui Pendidikan Kewarganegaraan perlu dilakukan secara sistematis melalui pendekatan pembelajaran yang partisipatif, dialogis, kontekstual, dan transformatif sehingga peserta didik tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga pengalaman nyata dalam mengimplementasikan nilai-nilai kewargaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan harus diposisikan sebagai pilar utama pembangunan karakter bangsa yang berorientasi pada pembentukan warga negara yang berintegritas, demokratis, adaptif terhadap perubahan, serta mampu berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, berkeadilan, dan berkelanjutan. Penguatan peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam pendidikan karakter pada akhirnya menjadi investasi strategis bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing global tanpa kehilangan identitas, nilai-nilai kebangsaan, serta karakter luhur yang berlandaskan Pancasila.

REFERENCES

- Banks, J. A. (2017). *Citizenship education and global migration: Implications for theory, research, and teaching*. American Educational Research Association.
- Bennett, W. L. (2008). *Civic life online: Learning how digital media can engage youth*. MIT Press.
- Berkowitz, M. W., & Bier, M. C. (2005). What works in character education: A research-driven guide for educators. *Character Education Partnership*.
- Biesta, G. J. J. (2011). *Learning democracy in school and society: Education, lifelong learning, and the politics of citizenship*. Sense Publishers.
- Branson, M. S. (1998). *The role of civic education*. Center for Civic Education.
- Choi, M. (2016). A concept analysis of digital citizenship for democratic citizenship education in the internet age. *Theory & Research in Social Education*, 44(4), 565–607. <https://doi.org/10.1080/00933104.2016.1210549>
- Cogan, J. J., & Derricott, R. (1998). *Citizenship for the 21st century: An international perspective on education*. Kogan Page.
- Davies, I., Gregory, I., & Riley, S. (2005). *Good citizenship and educational provision*. Routledge.
- Galston, W. A. (2001). Political knowledge, political engagement, and civic education. *Annual Review of Political Science*, 4(1), 217–234. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.4.1.217>
- Hoskins, B., Janmaat, J. G., & Villalba, E. (2012). Learning citizenship through social participation outside and inside school: An international, multilevel study of young people's learning of citizenship. *Educational Review*, 64(3), 259–275. <https://doi.org/10.1080/00131911.2011.590248>
- Isac, M. M., Maslowski, R., Creemers, B. P. M., & van der Werf, G. (2014). The contribution of schooling to secondary-school students' citizenship outcomes across countries. *School Effectiveness and School Improvement*, 25(1), 29–63. <https://doi.org/10.1080/09243453.2012.751035>
- Kahne, J., & Bowyer, B. (2017). Educating for democracy in a partisan age: Confronting the challenges of motivated reasoning and misinformation. *American Educational Research Journal*, 54(1), 3–34. <https://doi.org/10.3102/0002831216679817>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). *Penguatan pendidikan karakter (PPK)*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Profil pendidikan Indonesia tahun 2022*. Kemendikbudristek.
- Kerr, D. (1999). *Citizenship education: An international comparison*. National Foundation for Educational Research.
- Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.
- Lickona, T. (2012). *Character matters: Persoalan karakter, bagaimana membantu anak mengembangkan penilaian yang baik, integritas, dan kebajikan penting lainnya* (J. A. Wamaungo & J. Sauti, Trans.). Bumi Aksara.
- Nucci, L. P., Narvaez, D., & Krettenauer, T. (Eds.). (2014). *Handbook of moral and character education* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203114896>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *Beyond academic learning: First results from the survey of social and emotional skills*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/92a11084-en>

- Print, M. (2007). Citizenship education and youth participation in democracy. *British Journal of Educational Studies*, 55(3), 325–345. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8527.2007.00382.x>
- Reimers, F. M. (2020). *Educating students to improve the world*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-15-3887-2>
- Ribble, M. (2015). *Digital citizenship in schools: Nine elements all students should know* (3rd ed.). International Society for Technology in Education.
- Schulz, W., Ainley, J., Fraillon, J., Losito, B., Agrusti, G., & Friedman, T. (2018). *Becoming citizens in a changing world: IEA international civic and citizenship education study 2016 international report*. International Association for the Evaluation of Educational Achievement.
- Torney-Purta, J., Lehmann, R., Oswald, H., & Schulz, W. (2001). *Citizenship and education in twenty-eight countries: Civic knowledge and engagement at age fourteen*. International Association for the Evaluation of Educational Achievement.
- Veugelers, W. (2011). Theory and practice of citizenship education. *The Curriculum Journal*, 22(2), 209–224. <https://doi.org/10.1080/09585176.2011.560410>
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori dan landasan pendidikan kewarganegaraan*. Alfabeta.
- Westheimer, J., & Kahne, J. (2004). What kind of citizen? The politics of educating for democracy. *American Educational Research Journal*, 41(2), 237–269. <https://doi.org/10.3102/00028312041002237>
- Winarno. (2014). *Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan: Panduan kuliah di perguruan tinggi*. Bumi Aksara.
- Winataputra, U. S. (2015). *Pendidikan kewarganegaraan: Refleksi historis-epistemologis dan rekonstruksi untuk masa depan*. Universitas Terbuka.
- Zuchdi, D. (2010). *Pendidikan karakter dalam perspektif teori dan praktik*. UNY Press.
- Zuriah, N. (2015). *Pendidikan moral dan budi pekerti dalam perspektif perubahan: Menggagas platform pendidikan budi pekerti secara kontekstual dan futuristik*. Bumi Aksara.